

**ANALISIS PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SESUAI TEORI *THE
FOUR MAXIM TAXATION***



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh:

Martin Victor

2012130108

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
(Terakreditasi Berdasarkan Keputusan BAN-PT
Nomor: 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017**

***ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF CIVIL SERVANTS BASED ON THE
INCOME TAX COLLECTION SECTION 21 ACCORDING TO THE FOUR
MAXIM TAXATION THEORY***



UNDERGRADUATE THESIS

**Submitted to complete the requirements of
a Bachelor Degree in Economy**

by:

Martin Victor

2012130108

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMIC
ACCOUNTING STUDY PROGRAM
(Acredited based on Decree of BAN-PT
No. 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



**ANALISIS PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SESUAI TEORI *THE
FOUR MAXIM TAXATION***

Oleh:

Martin Victor

2012130108

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Januari 2017

Ketua Program Studi Akuntansi,

Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT.

Pembimbing,

Verawati Suryaputra, SE., MM., Ak., CA



PERNYATAAN:

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Martin Victor
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 6 Maret 1994
No. Pokok Mhs./NPM : 2012130108
Program studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL

ANALISIS PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SESUAI TEORI *THE
FOUR MAXIM TAXATION*

dengan,

Pembimbing : Verawati Suryaputra, SE., MM., Ak., CA

SAYA MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No 20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau cokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denga paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal: 9 Januari 2017

Pembuat pernyataan :



(Martin Victor)

ABSTRAK

Setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaksanakan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak seharusnya memiliki wawasan tentang pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan benar. Tata cara pemungutan pajak yang tidak jelas akan membuat banyak penafsiran dan keraguan bagi Wajib Pajak, sehingga dapat menimbulkan rendahnya tingkat kepatuhan pelaksanaan pajak. Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan topik persepsi PNS atas pemungutan PPh Pasal 21 karena secara subjektif kepatuhan Wajib Pajak sangat rendah sehingga peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai persepsi Wajib Pajak terkait pemungutan pajak.

Teori mengenai asas pemungutan pajak adalah salah satu karya Adam Smith yang dikemukakan pada bukunya yang berjudul "*Wealth of Nation*". Teori tersebut dinamakan "*The Four Maxim Taxation*", yang memiliki kriteria yaitu: *equity*, *certainty*, *convenience of payment*, dan *economics of collection*. Melalui teori ini diharapkan setiap Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam bidang perpajakan. Untuk melihat apakah asas-asas tersebut sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, peneliti melakukan analisis persepsi PNS atas pemungutan PPh Pasal 21 pada golongan yang berbeda.

Pengumpulan dan pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif tersebut berisi persepsi Wajib Pajak khususnya PNS terkait pemungutan PPh Pasal 21. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah kuesioner dan wawancara. Jumlah responden yang mengembalikan kuesioner sebanyak 30 orang yang berada pada golongan II, III, dan IV, sedangkan jumlah responden yang diwawancara sebanyak 2 orang yaitu bendahara dan kepala seksi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dikaji secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan PPh Pasal 21 pada PNS secara umum dapat dinyatakan telah sesuai dengan teori "*The Four Maxim Taxation*". Hal tersebut dinilai berdasarkan keempat kriteria yaitu *equity*, *certainty*, *convenience of payment*, dan *economics of collection*. Saran untuk unit penelitian: petugas pajak pada bidang penyuluhan atas nama pemerintah sebaiknya secara terus-menerus melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak khususnya PNS terkait pemungutan PPh Pasal 21 agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pajak. Selain itu untuk peneliti selanjutnya: penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya berkenaan dengan topik ini. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan subjek penelitian yang berbeda, menggunakan teori pemungutan pajak yang lain, serta jumlah responden yang lebih banyak.

Kata Kunci : Pemungutan PPh Pasal 21, Persepsi PNS

ABSTRACT

Every taxpayer has an obligation to implement the tax in accordance with applicable regulations. Taxpayers should have insight on taxes so that it can carry out tax obligations properly and correctly. The procedure for tax collection will obviously not make many interpretations and doubts for taxpayers, so it can lead to lack of compliance on the implementation of the tax. Researcher interested in conducting research on the topic of civil servants perception on the section 21 income tax collection for a subjective tax compliance so low that researcher wants to know more about the taxpayer perception related to taxation.

Theories about the principle of taxation is one of the works of Adam Smith put forward in his book entitled "Wealth of Nations". The theory is called "The Four Maxim Taxation", which has criteria: equity, certainty, convenience of payment, and the economics of collection. Through this theory is expected that every taxpayer can increase their compliance in the field of taxation. To see whether these principles are in accordance with the theory put forward by Adam Smith, the researchers conducted an analysis of the perception of civil servants based on the income tax collection section 21 at a different class.

Collection and processing of the data in this study using qualitative analysis. The qualitative analysis shows the perception of taxpayer particularly relevant with the income tax collection section 21 for civil servants. Data collection methods used by researcher is a questionnaire and interview. The number of respondents who returned the questionnaire as many as 30 people who were in class II, III, and IV, while the number of respondents interviewed by 2 people that is the treasurer and the head section. The data obtained are then processed and assessed descriptively to give an idea about the object of research.

Based on these results we can conclude that the income tax collection section 21 for the civil servants have been generally consistent with the theory of "The Four Maxim Taxation". It is judged on four criteria: equity, certainty, convenience of payment, and the economics of collection. Suggestions for research units: the tax officials in the field of education on behalf of the government should continuously socialized to taxpayers particularly relevant with the income tax collection section 21 for the civil servants so as not to cause a variety of different interpretations in the implementation of the tax. In addition to further research: This research can be further developed by researchers with regard to this topic. Subsequent studies may use different research subjects, using the theory that other tax collection, as well as the number of respondents who more.

Keywords : *The Section 21 Income Tax Collection, The Perception of Civil Servants*

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, pencerahan, serta kemurahan hati-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “ANALISIS PERSEPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SESUAI TEORI *THE FOUR MAXIM TAXATION*”. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Peneliti menyadari masih adanya kekurangan dalam pembuatan skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti membuka diri dan berterima kasih terhadap berbagai saran dan kritik yang bermanfaat bagi peneliti.

Pembuatan skripsi ini bukan hanya semata-mata usaha pribadi peneliti namun tidak lepas dari bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas berkat, penerangan, kasih, dan penyertaan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
2. Ir. Jusup dan Dra. Sulastri Wijaya, selaku kedua orang tua peneliti yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, dan kasih sayang yang tanpa henti kepada peneliti. Terima kasih atas dukungan moril, materil serta kesabaran yang telah diberikan kepada peneliti sehingga pembuatan skripsi ini dapat selesai.
3. Paul Victor, ST., M. Sc., selaku kakak kandung peneliti yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan kuliah.
4. Ibu Verawati Suryaputra, SE., MM., Ak., CA selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dalam pembuatan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, ilmu, nasihat-nasihat, dan masukan-masukan yang telah Ibu berikan kepada peneliti dalam pembuatan skripsi ini.

5. Jessi Bela Budiarta
6. Ibu Maria Merry Marianti, Dra., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
7. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
8. Bapak/Ibu dosen penguji pada sidang sarjana.
9. Seluruh dosen dan staf pengajar Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada peneliti selama peneliti menuntut ilmu di bangku kuliah.
10. Seluruh pengajar Brevet *Tac Tic Tax* dan Mba Ratih yang telah berkenan memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis terutama dalam bidang perpajakan.
11. Teman-teman STITCH (Shierly, Shirley, Erlin, Evan, Michael, Albert, Adit, Dea) selaku teman seperjuangan yang selalu ada di sisi peneliti. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan selama pembuatan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan skripsi perpajakan lainnya yang selalu membantu, memberikan semangat, dan saling memberikan masukan-masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Para responden yang telah meluangkan waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan guna pengumpulan data skripsi.
14. Segenap pihak lainnya baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya selama masa-masa kuliah.

Bandung, Desember 2016

Martin Victor

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Kerangka Pemikiran	4
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	6
2.1. Pajak	6
2.1.1. Pengertian Pajak	6
2.1.2. Fungsi Pajak	7
2.1.3. Wajib Pajak.....	8
2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.5. Pengklasifikasian Pajak	11
2.1.6. Stelsel Pajak.....	13
2.1.7. Hambatan Pemungutan Pajak	14
2.1.8. Tarif Pajak	15
2.2. Pajak Penghasilan (PPh).....	16
2.2.1. Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	16
2.2.2. Subjek Pajak Penghasilan	16
2.2.3. Objek Pajak Penghasilan	18
2.3. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	23
2.3.1. Definisi PPh Pasal 21.....	23
2.3.2. Pemotongan PPh Pasal 21	23
2.3.3. Subjek PPh Pasal 21	24
2.3.4. Objek PPh Pasal 21.....	25
2.3.5. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Final	27

2.4. Tarif dan Sifat Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima PNS yang Berasal dari APBN/APBD	28
2.5. Asas Pemungutan Pajak Menurut Adam Smith	29
2.6. Penelitian Sebelumnya	31
BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN.....	33
3.1. Metode Penelitian	33
3.1.1. Kerangka Penelitian.....	33
3.1.2. Sumber Data	36
3.1.3. Metode Pengumpulan Data	37
3.1.4. Metode Pengolahan Data.....	38
3.1.5. Variabel Penelitian.....	39
3.2. Objek dan Unit Penelitian.....	39
3.2.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Bandung Bojonagara.....	39
3.2.2. Visi dan Misi	41
3.2.3. Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Bojonagara.....	41
3.2.4. Uraian Tugas pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.....	43
3.2.5. Kegiatan KPP Pratama Bandung Bojonagara	45
3.3. Gambaran Umum Data	46
3.3.1. Gambaran Umum Kuesioner.....	46
3.3.2. Gambaran Umum Responden.....	47
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1. Analisis Persepsi PNS atas Asas <i>Equity</i>	51
4.2. Analisis Persepsi PNS atas Asas <i>Convenience of Payment</i>	56
4.3. Analisis Persepsi PNS atas Asas <i>Certainty</i>	60
4.4. Analisis Persepsi PNS atas Asas <i>Economics of Collection</i>	64
4.5. Kesesuaian Pemungutan PPh Pasal 21 dengan Teori <i>The Four Maxim Taxation</i>	66
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbandingan Tarif dan Sifat Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima PNS yang Berasal dari APBN/APBD	28
Tabel 3.1. Responden Merupakan Penerima Penghasilan yang Bersumber dari APBN/APBD.....	47
Tabel 3.2. Golongan pada Responden.....	48
Tabel 4.1. Responden Mengetahui Besar Tarif Pemotongan Pajak.....	53
Tabel 4.2. Responden Diperlakukan Adil atas Tarif Pajak Penghasilan yang Dikenakan.....	54
Tabel 4.3. Pemungutan PPh Pasal 21 bersifat final	59
Tabel 4.4. Responden Merasa Pemerintah Sudah Menerapkan Aturan yang Jelas Terhadap Pemotongan PPh Pasal 21	61
Tabel 4.5. Responden Merasa Diperlakukan Sewenang-Wenang Dalam Penerapan Tarif PPh Pasal 21 Bersifat Final	63
Tabel 4.6. Responden Melaporkan Penghasilan yang Diterima Dalam SPT PPh.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kerangka Penelitian	36
Gambar 3.2. Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Bojonagara	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan suatu negara yang memanfaatkan pajak sebagai sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai keperluan negara termasuk pembangunan nasional. Setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaksanakan perpajakan di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah Wajib Pajak dari waktu ke waktu juga semakin bertambah. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pajak seharusnya memiliki wawasan tentang pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan benar. Beragamnya peraturan dan perubahan yang ada di sektor pajak perlu disosialisasikan, sehingga Wajib Pajak memperoleh pemahaman yang jelas. Tata cara pemungutan pajak yang benar juga harus dijelaskan kepada setiap Wajib Pajak.

Salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *with holding system*. *With holding system* merupakan sistem perpajakan di mana pihak ketiga diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dalam memungut atau memotong besarnya pajak terhutang yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga di sini adalah orang atau badan yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh pemerintah atas dasar undang-undang untuk memungut pajak. Hal ini dilakukan karena jumlah aparat perpajakan yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang ada. Sistem ini berguna agar pemerintah dapat menghemat biaya pemungutan pajak dan juga sebagai bukti bahwa pemerintah mempercayai Wajib Pajak untuk menghitung dan mengurus perpajakannya di Indonesia.

Penerapan *with holding system* memperlancar masuknya dana ke kas negara tanpa intervensi fiskus. Wajib Pajak yang dipungut pajaknya, secara tidak langsung telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, sistem ini juga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu pajak yang menerapkan *with holding system* adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 21 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Pada praktiknya, undang-undang yang mengatur tentang pemungutan PPh Pasal 21 harus memberikan aturan yang jelas bagi setiap Wajib Pajak yang hendak melaksanakan kewajibannya. Salah satu asas pemungutan pajak yang populer adalah "*The Four Maxim Taxation*" yang dikemukakan oleh Adam Smith. Dalam bukunya, Adam Smith memberikan kriteria bahwa undang-undang pajak sebaiknya memenuhi beberapa persyaratan. Penyusunan undang-undang pajak diharapkan memenuhi persyaratan yang tepat sehingga undang-undang tersebut mencerminkan adanya keadilan, kepastian hukum, ekonomis, dan tepat.

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai asas pemungutan pajak sesuai teori *The Four Maxim Taxation* dengan objek yaitu persepsi PNS atas pemungutan PPh Pasal 21. Peneliti memilih persepsi PNS sebagai objek penelitian karena secara umum para PNS yang bekerja di kantor pelayanan pajak memiliki dasar dan pengetahuan di bidang perpajakan. Selain itu, pada PNS terdapat golongan yang menunjukkan jabatan dan tarif pajak yang berbeda-beda sehingga penelitian dapat dilakukan pada subjek pajak yang memiliki tarif pemungutan PPh Pasal 21 yang berbeda-beda pula. Secara deskriptif, asas-asas tersebut akan dibahas dan dikaji secara mendalam sehingga peneliti dapat mengetahui lebih jauh mengenai persepsi Wajib Pajak PNS terkait pemungutan pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan teori *The Four Maxim Taxation* - Adam Smith melalui studi kasus PPh Pasal 21 pada PNS, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian penulis. Berikut ini adalah permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi, yaitu:

1. Apakah Wajib Pajak PNS merasa diperlakukan adil atas tarif pajak yang berbeda pada setiap golongan pangkat?

2. Apakah saat pemungutan pajak sudah tepat sehingga memudahkan Wajib Pajak PNS untuk membayarnya?
3. Apakah pemerintah sudah menerapkan aturan yang jelas bagi Wajib Pajak PNS dalam melaksanakan kewajiban perpajakan?
4. Apakah biaya pemungutan pajak sudah efektif dan efisien sehingga tidak melebihi penerimaan pajak?
5. Apakah pemungutan PPh Pasal 21 pada PNS telah sesuai dengan teori *The Four Maxim Taxation* yang dikemukakan oleh Adam Smith?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada skripsi ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui keadilan pengenaan pajak penghasilan yang memiliki tarif berbeda pada setiap golongan pangkat Wajib Pajak PNS.
2. Mengetahui saat yang tepat bagi Wajib Pajak PNS untuk membayar PPh Pasal 21.
3. Mengetahui persepsi Wajib Pajak PNS atas kejelasan pengenaan PPh Pasal 21 final yang dipungut oleh pihak ketiga.
4. Mengetahui apakah dengan *with holding system* merupakan cara yang efektif dan efisien dalam pemungutan PPh Pasal 21 pada PNS.
5. Mengetahui pemungutan PPh Pasal 21 pada PNS, apakah telah sesuai dengan teori *The Four Maxim Taxation* yang dikemukakan oleh Adam Smith?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian dan pembahasan terkait PPh Pasal 21 pada PNS sesuai teori "*The Four Maxim Taxation*" – Adam Smith, diharapkan dapat bermanfaat terhadap berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penulis memperoleh pemahaman dan wawasan mengenai PPh Pasal 21 serta berkesempatan untuk memperdalam teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Bagi Pembaca

Melalui penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca khususnya untuk bidang akuntansi perpajakan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang memberikan informasi tambahan terkait dengan topik penulisan yang serupa di kemudian hari.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang harus dikelola dengan benar dan sebaik mungkin. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kelonggaran bagi setiap Wajib Pajak untuk mengurus perpajakan mereka sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab.

Adam Smith, dalam salah satu bukunya yang berjudul “*Wealth of Nation*” mengemukakan suatu teori mengenai asas pemungutan pajak. Teori tersebut dinamakan “*The Four Maxim Taxation*”, yang memiliki kriteria yaitu: *equity*, *certainty*, *convenience of payment*, dan *economics of collection*. Melalui teori tersebut diharapkan setiap Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam bidang perpajakan. Apabila Wajib Pajak patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka target pendapatan pada APBN/APBD akan tercapai.

Asas pertama yaitu *equity* atau keadilan. Keadilan dalam perpajakan mengenai kemampuan Wajib Pajak untuk membayar dan melunasi kewajiban perpajakan mereka serta manfaat yang diperoleh Wajib Pajak atas pembayaran pajak tersebut. Pada jurnal penelitian sebelumnya terkait asas pertama, peneliti memberikan pertanyaan kepada responden apakah mereka merasa adil dengan pemungutan tarif pemotongan pajak yang berbeda-beda antar golongan.

Asas kedua yaitu *certainty* atau kepastian hukum. Hal ini harus memenuhi siapa yang harus dikenakan pajak, apa yang menjadi dasar untuk mengenakan pajak, dan berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif pajak. Pada jurnal penelitian sebelumnya terkait asas kedua, peneliti memberikan pertanyaan kepada responden apakah dengan PPh Pasal 21 yang bersifat final telah membuat Wajib Pajak sudah menunaikan kewajiban perpajakannya.

Asas ketiga yaitu *convenience of payment* atau pajak harus dipungut pada saat yang tepat. Pembayaran pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Pada jurnal penelitian sebelumnya terkait asas ketiga, peneliti memberikan pertanyaan kepada responden apakah lebih baik dilakukan pemungutan atau Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri atas pajak dari penghasilan tersebut.

Asas keempat yaitu *economics of collection* atau biaya pemungutan pajak harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan uang pajak yang masuk. Biaya pemungutan dan biaya dalam memenuhi kewajiban pajak hendaknya sekecil mungkin sehingga beban pajak dioptimalkan seekonomis mungkin.

Untuk melihat apakah asas-asas tersebut sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, penulis melakukan studi pustaka dan analisis PPh Pasal 21 atas para PNS pada golongan pangkat yang berbeda. Pembuatan skripsi ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Sony Dang Utama dengan judul “Analisis Pengenaan PPh Pasal 21 Terhadap Honor Yang Berasal Dari APBN Dan APBD Yang Diterima PNS, TNI, Dan POLRI Ditinjau Dari Asas-Asas *The Four Maxim Taxation*” pada tahun 2013. Pada penelitian tersebut, Sony menyimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara teori Adam Smith dengan praktik yang terjadi pada Wajib Pajak di Indonesia. Oleh karena itu, penulis hendak melanjutkan penelitian tersebut dengan kondisi dan keadaan saat ini serta dengan subjek penelitian yang berbeda. Perbedaan lainnya adalah metode dan analisis penelitian yang digunakan.